

Optimalisasi Kartu Indonesia Pintar dalam Mendukung Akses Pendidikan Berkualitas (SDG 4) bagi Siswa Kurang Mampu

Nasywa Putri Kumara¹, Firza Alifatuz Zhulfa², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

^{1*}25040674134@mhs.unesa.ac.id, ²25040674146@mhs.unesa.ac.id

, ³firresuprpto@unesa.ac.id, ⁴indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Hak warga negara atas pendidikan telah dijamin oleh konstitusi dan menjadi pilar pembangunan nasional. Namun, ketimpangan geografis dan kemiskinan masih menghambat akses pendidikan yang merata di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai instrumen kebijakan serta merumuskan strategi optimalisasi implementasinya dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG 4: Quality Education)*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa KIP berkontribusi dalam mengurangi beban biaya pendidikan, meningkatkan partisipasi sekolah, serta memperluas akses bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, sehingga turut menekan angka putus sekolah. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan sasaran penerima, ketidaksinkronan data, dan lemahnya pengawasan. Selain itu, bantuan finansial belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa dukungan sistem pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan mekanisme pengawasan agar kontribusi KIP terhadap *SDG 4* lebih optimal dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kartu Indonesia Pintar, pendanaan pendidikan, pemerataan akses, *SDG 4*, pendidikan inklusif.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama yang bersumber dari ketimpangan sosial-ekonomi dan kondisi geografis. Tingginya angka kemiskinan serta masih ditemukannya kasus putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menunjukkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks global, Indonesia juga telah menyatakan komitmennya terhadap agenda Sustainable Development Goals, khususnya tujuan keempat (SDG 4) yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Meskipun demikian, masih adanya kesenjangan partisipasi dan kualitas pendidikan antarwilayah mengindikasikan adanya jarak antara target normatif yang ditetapkan dalam SDG 4 dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar sebagai instrumen pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. KIP dirancang untuk mengurangi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan serta mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

KIP merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas. Dana bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, seperti biaya transportasi, perlengkapan belajar, dan uang saku penunjang kegiatan pendidikan. Melalui program ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena alasan biaya. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya serta merumuskan strategi

optimalisasi yang lebih konkret. Strategi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem pendataan penerima, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan mekanisme pengawasan agar distribusi bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan KIP dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul di lapangan secara berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber relevan, seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, laporan resmi pemerintah, serta dokumen kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kajian difokuskan pada peran KIP sebagai instrumen pendanaan pendidikan dalam mengurangi beban biaya, meningkatkan partisipasi sekolah, dan memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, termasuk data penerima KIP tahun 2024–2025. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengintegrasikan temuan literatur, data statistik, dan dokumen kebijakan untuk menilai kontribusi KIP dalam mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tujuan SDG 4.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut *George Edward III* (1980), implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga melibatkan interaksi berbagai aktor, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, implementasi memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi menjadi indikator utama efektivitas suatu kebijakan pendidikan.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah satu kebijakan pendanaan pendidikan membutuhkan pelaksanaan yang berjalan efektif dan tepat sasaran. Implementasi KIP yang baik diharapkan mampu membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, mendorong peserta didik untuk tetap bersekolah, serta membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata.

Teori Implementasi Kebijakan *George Edward III*

Salah satu teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori dari *George Edward III* (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), komunikasi diperlukan agar tujuan, mekanisme penyaluran, dan penggunaan dana dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana dan penerima manfaat. Sumber daya, baik berupa anggaran, aparatur, maupun informasi, menjadi faktor penting agar bantuan pendidikan dapat disalurkan secara tepat dan berkelanjutan.

Disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan tingkat komitmen birokrasi dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berperan dalam mengatur pembagian tugas dan koordinasi antarinstansi yang terlibat agar pelaksanaan KIP berjalan efektif. Dengan demikian, keempat variabel tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi Program Kartu Indonesia Pintar.

Alat Analisis Kebijakan

Dalam menganalisis kebijakan publik serta merumuskan strategi optimalisasi, penelitian ini menggunakan pendekatan *SWOT Analysis*. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu kebijakan, yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks penelitian ini, *SWOT Analysis* digunakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekaligus merumuskan strategi optimalisasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas program dalam mendukung akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kartu Indonesia Pintar sebagai Instrumen Pendanaan Pendidikan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah. Program ini berada di bawah koordinasi pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan dukungan berbagai lembaga terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendidikan (Saputra & Suryani, 2025).

KIP menjadi salah satu instrumen kebijakan pendanaan pendidikan yang diberikan langsung kepada peserta didik untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Program Kartu Indonesia Pintar memiliki tujuan utama untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat oleh keterbatasan biaya. Selain itu, KIP juga diharapkan mampu mencegah terjadinya putus sekolah serta mendorong siswa untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi. Dengan adanya bantuan pendidikan yang diberikan secara langsung kepada peserta didik, siswa dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak (Sufni, 2024).

Sasaran utama penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar adalah peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Program ini ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan mereka. Umumnya penerima bantuan berasal dari keluarga yang terdaftar dalam basis data kesejahteraan sosial atau memiliki kartu perlindungan sosial dari pemerintah.

Ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Apabila bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, maka program KIP dapat membantu meningkatkan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat (Nikmah et al., 2020). Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penentuan penerima bantuan sehingga diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat.

Bantuan pendidikan yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar berupa bantuan dana tunai yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, buku pelajaran, serta kebutuhan lain yang mendukung kegiatan belajar.

Bantuan ini diberikan secara bertahap sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik. Kehadiran bantuan finansial ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan lebih baik dan tidak terkendala oleh keterbatasan biaya (Saputra & Suryani, 2025).

Salah satu fungsi utama program KIP adalah untuk mengurangi hambatan biaya pendidikan yang sering menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya pendidikan seperti seragam sekolah, perlengkapan belajar, dan transportasi dapat menjadi beban yang cukup besar. Oleh karena itu, bantuan pendidikan melalui program KIP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu keluarga kurang mampu agar tetap dapat menyekolahkan anak-anak mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa program KIP memiliki kontribusi dalam membantu menekan angka putus sekolah serta meningkatkan partisipasi pendidikan. Bantuan yang diberikan melalui program ini memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan dan mengikuti proses belajar secara lebih optimal.

Secara keseluruhan, program Kartu Indonesia Pintar menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung pendanaan pendidikan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Melalui bantuan finansial yang diberikan kepada peserta didik, program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan, mengurangi hambatan biaya pendidikan, serta mendukung terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata.

Kontribusi KIP dalam Meningkatkan Akses dan Partisipasi Pendidikan

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan bagi peserta didik di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui bantuan biaya pendidikan yang diberikan secara langsung kepada siswa, program ini membantu mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah.

Salah satu dampak yang dapat dilihat adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi sekolah di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada kelompok usia sekolah dasar dan menengah. Program bantuan pendidikan seperti KIP turut berperan dalam mendorong anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain meningkatkan partisipasi pendidikan, program KIP juga berkontribusi dalam menurunkan angka putus sekolah. Bantuan yang diberikan melalui KIP membantu siswa memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, serta kebutuhan belajar lainnya. Dengan adanya dukungan tersebut, siswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap melanjutkan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dkk. menunjukkan bahwa program KIP memiliki pengaruh dalam mengurangi risiko putus sekolah karena membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga penerima manfaat (Nikmah et al., 2020).

KIP juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin atau yang berada di daerah dengan keterbatasan ekonomi. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Saputra dkk. menjelaskan bahwa implementasi

program KIP berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan (Saputra et al., 2025).

Selain itu, keberadaan KIP turut mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah. Bantuan pendidikan yang diberikan secara berkelanjutan membantu siswa untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan menengah. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan dasar, tetapi juga mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam perspektif Teori Edward III

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah teori dari George Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam konteks Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), keempat variabel tersebut memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan:

a. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam implementasi KIP, komunikasi mencakup sosialisasi program kepada sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat. Informasi yang tidak jelas atau tidak merata dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam proses pelaksanaan dan penyaluran bantuan.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam program KIP, ketersediaan anggaran yang memadai, sistem pendataan penerima bantuan, serta kapasitas lembaga pelaksana menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

c. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Dalam implementasi KIP, dukungan dari pemerintah daerah, pihak sekolah, serta lembaga terkait sangat menentukan keberhasilan program. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi cenderung mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, prosedur kerja, serta koordinasi antar lembaga. Dalam pelaksanaan KIP, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah menjadi kunci agar proses penyaluran bantuan berjalan efektif dan tidak mengalami hambatan administratif. Dengan demikian, keempat variabel tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi Program Kartu Indonesia Pintar. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala pada masing-masing aspek tersebut, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Dalam kajian kebijakan publik, suatu kebijakan umumnya lahir sebagai respons terhadap adanya public problem. Public problem merupakan kondisi atau situasi yang dipandang oleh masyarakat sebagai masalah bersama yang memerlukan intervensi pemerintah untuk penyelesaiannya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi masih menjadi salah satu permasalahan publik yang signifikan. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu mengurangi hambatan tersebut dan memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Untuk mengatasi permasalahan publik tersebut, pemerintah menggunakan berbagai *policy instrument* atau instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Instrumen ini dapat berbentuk regulasi, insentif ekonomi, maupun program bantuan langsung kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu program bantuan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan.

Pendidikan sendiri sering dipandang sebagai public goods karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menerima pendidikan, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan juga sejalan dengan agenda pembangunan global yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Salah satu tujuan dalam *SDGs* adalah *Goal 4* yaitu *Quality Education* yang menekankan pentingnya memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata bagi semua. Dalam konteks ini, Program Kartu Indonesia Pintar menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang berkontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Kendala Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam mendukung pendidikan berkualitas masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Meskipun program ini terbukti mampu

meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran penerima, ketidaksinkronan data antarinstansi, lemahnya pengawasan, keterlambatan penyaluran bantuan, serta proses administrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga menghambat tercapainya tujuan program secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KIP masih memerlukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh peserta didik yang berhak.

Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Dalam berbagai penelitian, ditemukan bahwa program KIP belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria, sementara kelompok yang seharusnya berhak justru belum menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dan verifikasi penerima belum berjalan secara maksimal. Permasalahan tersebut juga terjadi karena masih kurangnya integritas dan sinkronisasi antar lembaga pengelola data, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dalam mengelola, memperbarui, dan memvalidasi data calon penerima bantuan.

Selain itu, banyak keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi untuk mendapatkan bantuan KIP. Berkas yang dibutuhkan sering kali cukup banyak, proses pengurusannya rumit, serta prosedurnya dianggap berbelit-belit sehingga menyulitkan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan akses informasi dan ekonomi. Tidak sedikit orang tua siswa yang kesulitan melengkapi dokumen seperti kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, maupun sinkronisasi data kependudukan. Kondisi ini menyebabkan sebagian siswa yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru tidak dapat mengakses program KIP karena terkendala pada proses administrasi yang kurang sederhana.

Akibat dari lemahnya pengelolaan data tersebut, masih ditemukan siswa dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sedangkan siswa dari keluarga miskin belum terdaftar sebagai penerima. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan pendidikan dan menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ketidaksinkronan data penerima bantuan antarinstansi juga menjadi kendala yang cukup krusial. Data penerima yang digunakan sering kali tidak terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga menimbulkan perbedaan informasi dan kesalahan dalam penetapan penerima bantuan. Kondisi ini bahkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena adanya penerima manfaat yang dinilai tidak tepat sasaran.

Keterbatasan pengawasan program serta keterlambatan penyaluran bantuan juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi KIP. Pengawasan yang belum maksimal menyebabkan kurangnya kontrol terhadap distribusi dan penggunaan dana bantuan, sehingga dalam beberapa kasus dana tidak digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan. Di sisi lain, proses birokrasi dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif menyebabkan pencairan dana sering terlambat, padahal kebutuhan pendidikan siswa bersifat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem data nasional, penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan transparansi dalam proses verifikasi penerima, pengawasan yang lebih ketat, serta evaluasi rutin terhadap mekanisme penyaluran bantuan agar Program KIP dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar mendukung pencapaian pendidikan berkualitas sesuai dengan tujuan *SDG 4*.

Analisis SWOT Program Kartu Indonesia Pintar

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
OPPORTUNITY	Bantuan biaya pendidikan dan cakupan nasional dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan melalui digitalisasi data dan dukungan kebijakan pemerintah.	Ketidaksinkronan data dan administrasi rumit diperbaiki melalui integrasi sistem digital dan kebijakan pemerintah.
THREAT	Cakupan nasional dan dukungan lembaga digunakan untuk memperkuat pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dana dan keterlambatan distribusi.	Perbaikan akurasi data dan penyederhanaan birokrasi untuk menghindari kecemburuan sosial dan ketimpangan akses pendidikan.

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki posisi yang cukup kuat dalam mendukung peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dari sisi kekuatan (*strengths*), program ini memberikan bantuan biaya pendidikan secara langsung dan memiliki jangkauan nasional, sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi sekolah serta menekan angka putus sekolah. Kekuatan ini menjadi modal penting untuk memanfaatkan berbagai peluang eksternal, seperti dukungan kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pengelolaan data penerima bantuan menjadi lebih terintegrasi dan akurat. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kelemahan (*weaknesses*), terutama terkait ketidaktepatan sasaran penerima, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta proses administrasi yang belum efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pada aspek tata kelola menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

Dalam konteks ini, peluang seperti digitalisasi sistem dan penguatan kebijakan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, misalnya melalui integrasi basis data dan penyederhanaan prosedur penyaluran bantuan. Di sisi lain, terdapat ancaman (*threats*) yang perlu diantisipasi agar program tetap berjalan optimal. Risiko seperti penyalahgunaan dana, keterlambatan distribusi akibat birokrasi, serta ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil dapat menghambat efektivitas program. Kekuatan yang dimiliki KIP, seperti dukungan kelembagaan dan cakupan nasional, seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Selain itu, kelemahan yang belum ditangani dengan baik berpotensi memperbesar dampak dari ancaman yang ada, misalnya memicu kecemburuan sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata. Oleh karena itu, upaya perbaikan seperti peningkatan akurasi data, transparansi, serta penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko tersebut. Secara keseluruhan, optimalisasi kekuatan dan peluang, serta pengendalian kelemahan dan ancaman, menjadi kunci agar Program KIP dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Upaya Optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu terus dioptimalkan agar tujuan utamanya dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu dapat tercapai secara maksimal. Meskipun program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, masih terdapat berbagai kendala seperti ketidaktepatan sasaran penerima, data yang tidak sinkron, keterlambatan penyaluran bantuan, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa KIP masih memerlukan perbaikan yang lebih komprehensif agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa alternatif kebijakan yang dapat menjadi solusi strategis dalam mengoptimalkan implementasi program KIP.

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan melalui integrasi data nasional. Selama ini, ketidaktepatan sasaran sering terjadi karena data yang digunakan belum akurat dan tidak diperbarui secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Pendidikan, serta Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis utama. Melalui sistem data yang terintegrasi dan real-time, proses seleksi penerima bantuan akan menjadi lebih tepat sasaran serta mampu meminimalkan kesalahan dalam penyaluran dana.

Selain perbaikan sistem data, proses verifikasi penerima bantuan perlu diperkuat melalui peran aktif sekolah. Sekolah sebagai pihak yang paling dekat dengan kondisi siswa memiliki informasi yang lebih akurat terkait latar belakang ekonomi peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk melakukan validasi langsung terhadap calon penerima KIP, disertai dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan terstandar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penentuan penerima serta memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada siswa yang membutuhkan.

Optimalisasi program KIP juga perlu didukung dengan digitalisasi sistem pengelolaan bantuan. Pengembangan sistem berbasis online yang transparan dapat mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, pencairan, hingga pelaporan penggunaan dana. Selain itu, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan mekanisme pengawasan berbasis digital, sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan monitoring secara real-time. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalkan.

Selain ketiga alternatif tersebut, penguatan koordinasi antar lembaga juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan. Selama ini, hambatan implementasi KIP sering muncul akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga pengelola data. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis agar proses verifikasi, pencairan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Kebijakan KIP juga perlu diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial. Integrasi ini penting agar bantuan pendidikan yang diberikan tidak bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Dengan demikian, risiko putus sekolah dapat ditekan secara lebih berkelanjutan.

Secara keseluruhan, optimalisasi Program KIP membutuhkan perbaikan dalam sistem pendataan, pengawasan yang lebih ketat, koordinasi antar lembaga yang lebih kuat, serta dukungan dari kebijakan sosial lainnya. Jika alternatif kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, maka Program KIP akan semakin efektif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya *SDG 4* yaitu pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata.

Kontribusi KIP terhadap Pencapaian *SDG 4* (Quality Education)

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDG) poin 4, yaitu pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Program ini bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi. Bantuan yang diberikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) disalurkan dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti pembelian seragam, alat tulis, buku, biaya transportasi, serta kebutuhan pendukung pendidikan lainnya. Pada tahun 2026, besaran bantuan yang diberikan berbeda sesuai jenjang pendidikan, yaitu SD sebesar Rp450.000 per tahun, SMP sebesar Rp750.000 per tahun, dan SMA/SMK mencapai Rp1.800.000 per tahun per siswa. (Kementerian Pendidikan, Juni 2025, paragraf 8)

KIP memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan yang inklusif karena program ini menysasar kelompok rentan seperti siswa dari keluarga miskin, yatim piatu, anak dari keluarga penerima bantuan sosial, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal. Bantuan tersebut memungkinkan siswa tetap bersekolah dan mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Pemerintah juga menargetkan sekitar 19 juta peserta didik sebagai penerima bantuan PIP tahun 2026, dengan jumlah penerima terbesar berada pada jenjang sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga akses pendidikan sejak jenjang paling dasar agar tidak terjadi kesenjangan pendidikan sejak awal.

KIP berperan krusial dalam pendidikan inklusif dengan menysasar kelompok rentan, seperti siswa dari keluarga miskin, yatim piatu, penerima bantuan sosial, serta penduduk daerah tertinggal. Bantuan ini memungkinkan siswa tetap bersekolah dan mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Pemerintah menargetkan 19 juta penerima KIP pada 2026, dengan mayoritas di jenjang SD, menunjukkan upaya menjaga akses pendidikan sejak dasar untuk mencegah kesenjangan dini. Kehadiran KIP membantu meringankan beban ekonomi keluarga sehingga siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Program ini mendukung pemerataan pendidikan karena memberikan peluang yang lebih adil bagi seluruh peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Keberhasilan pencapaian SDG 4 tidak hanya bergantung pada bantuan pendidikan seperti KIP. Peningkatan kualitas pendidikan juga membutuhkan dukungan dari aspek lain seperti kualitas tenaga pendidik, fasilitas sekolah yang memadai, kurikulum yang relevan, serta sistem pengawasan yang efektif. Bantuan dana pendidikan memang penting untuk menjaga keberlanjutan sekolah bagi siswa kurang mampu, tetapi kualitas pembelajaran tetap menjadi faktor utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu. Tanpa adanya dukungan sistem pendidikan yang lebih luas, bantuan finansial hanya menjadi solusi jangka pendek.

Secara keseluruhan, Program KIP memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 4 melalui peningkatan akses pendidikan, pengurangan angka putus sekolah, dan pemerataan kesempatan belajar bagi kelompok rentan. Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan bantuan pendidikan memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Namun, agar hasilnya lebih maksimal, pemerintah perlu terus memperbaiki sistem pendataan, pengawasan, serta kualitas layanan pendidikan sehingga manfaat KIP dapat dirasakan secara lebih luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung pendanaan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Program ini hadir sebagai respons atas permasalahan ketimpangan akses pendidikan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sehingga pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak tetap dapat memperoleh hak pendidikan secara layak dan berkelanjutan. Melalui bantuan dana tunai yang diberikan secara langsung, KIP mampu meringankan beban biaya pendidikan yang selama ini menjadi hambatan utama dalam keberlangsungan pendidikan peserta didik.

Dalam implementasinya, KIP terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di Indonesia. Program ini berperan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah, menekan angka putus sekolah, serta memperluas kesempatan belajar bagi kelompok rentan. Selain itu, KIP juga mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang.

Jika dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan KIP dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Meskipun program ini telah berjalan dan memberikan dampak positif, pelaksanaannya masih belum optimal karena terdapat berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, ketidaksinkronan data antarinstansi, proses administrasi yang kompleks, keterlambatan penyaluran bantuan, serta lemahnya pengawasan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam aspek teknis maupun kelembagaan agar program dapat berjalan lebih efektif.

Program KIP juga memiliki kontribusi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Sustainable Development Goals poin 4 tentang pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Program ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh peserta didik. Namun demikian, pencapaian pendidikan berkualitas tidak hanya bergantung pada bantuan finansial, melainkan juga memerlukan dukungan dari aspek lain seperti kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, dan sistem pendidikan yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang relevan dan berdampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dalam sistem pendataan, pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan penerima bantuan melalui integrasi dan pembaruan data secara berkala serta meningkatkan ketelitian dan selektivitas dalam proses verifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Pengelolaan data harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan meminimalkan potensi intervensi yang tidak sesuai dengan kriteria penetapan penerima bantuan.

Selain itu, prosedur administrasi perlu disederhanakan agar proses pengajuan dan pencairan bantuan menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pemanfaatan sistem digital juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan perlu diperkuat guna memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga harus ditingkatkan agar implementasi program berjalan lebih efektif dan meminimalkan kesalahan dalam distribusi bantuan.

Program Kartu Indonesia Pintar perlu diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan lainnya agar dampaknya lebih berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan akses pendidikan melalui bantuan finansial harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun sistem pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan yang inklusif dan merata dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, A., & Sawir, M. (2024). Membangun budaya pelayanan publik yang ramah: Implementasi teknologi digital dalam birokrasi pemerintahan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 216-228.
- Anwar, K. (2022). Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik pendidikan Indonesia 2024. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indikator kesejahteraan rakyat 2025. Badan Pusat Statistik.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 56.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Program Indonesia Pintar: Laporan pelaksanaan tahun 2024. Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2025. Kemendikbudristek.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Juni 2, 2025.). *Tanya jawab tentang program Indonesia Pintar*. <https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/tanya-jawab-tentang-program-indonesia-pintar-1/>
- LAWALU, S. P. A., & KLEDEN, M. (2024). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Melalui Pendekatan Teori George Edward Iii Di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. *JSHI: Jurnal Studi Humaniora Interdisipliner*, 8(11), 65-73.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar berhasil menurunkan angka putus sekolah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 72.
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145-6154.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2014).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2017).
- Putri, P. A., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan Di Indonesia: Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, Dan BOS Melalui Studi Literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 1158-1165.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.
- Saputra, B. P., & Suryani, E. I. (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1467-1476.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238-251.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9-19.

Siahaan, R. L. M., Arianti, J., & Thalib, N. (2023). Perkembangan pendidikan berkualitas di indonesia: Analisis sdgs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 975-985.

Sufni, N. (2024). Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(2), 38-45.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 31.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 31.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.